

Pengaruh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Febri Yanto^{1✉}, Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng²

^{1,2}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai strategi utama dalam memperkuat desentralisasi dan meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan. Namun, implementasi SPBE masih menghadapi kendala signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta resistensi birokrasi terhadap perubahan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi SPBE dalam mendukung desentralisasi dan otonomi daerah serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPBE telah meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi, meskipun masih terdapat hambatan dalam aspek teknis dan sosial. Studi perbandingan dengan model e-government di Estonia dan Korea Selatan mengungkapkan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan bergantung pada kesiapan infrastruktur, kebijakan yang terintegrasi, serta peningkatan literasi digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kebijakan digital menjadi langkah strategis dalam optimalisasi implementasi SPBE di Kota Pangkal Pinang.

Kata Kunci: SPBE, Desentralisasi, Digitalisasi Pemerintahan, Tata Kelola, E-Government.

Abstract

Digital transformation in the government sector is a necessity in facing the challenges of the globalization era and the industrial revolution 4.0. The Pangkal Pinang City Government has adopted Electronic-Based Government System (EBS) as a key strategy in strengthening decentralization and improving the efficiency of governance. However, the implementation of SPBE still faces significant obstacles, such as limited human resources, uneven technological infrastructure, and bureaucratic resistance to digital change. This study aims to analyze the effectiveness of SPBE implementation in supporting decentralization and regional autonomy and identify the challenges faced. Using a qualitative approach with a case study method, data was obtained through in-depth interviews, observation, and analysis of policy documents. The results showed that SPBE has improved transparency and administrative efficiency, although there are still barriers in technical and social aspects. A comparative study with e-government models in Estonia and South Korea revealed that the success of government digitalization depends on infrastructure readiness, integrated policies, and increased digital literacy. Therefore, increasing the capacity of human resources and strengthening digital policies are strategic steps in optimizing the implementation of SPBE in Pangkal Pinang City.

Keywords: SPBE, Decentralization, Government Digitalization, Governance, E-Government.

✉ Corresponding author : DIP.13.815@ipdn.ac.cd

Email Address : DIP.13.815@ipdn.ac.cd, zubakhrum@gmail.com

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Di Indonesia, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola sumber daya dan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien (Suriadi et al., 2024). Otonomi daerah yang semakin berkembang menuntut inovasi dalam tata kelola pemerintahan, di mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi birokrasi (Choirunnisa et al., 2023). Kota Pangkal Pinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam mengimplementasikan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara telah mengadopsi e-government sebagai instrumen utama dalam reformasi birokrasi. Negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Denmark telah menunjukkan keberhasilan dalam penerapan e-government yang berdampak pada peningkatan efisiensi layanan publik dan transparansi pemerintahan (Alfayn, 2022). Studi yang dilakukan di Korea Selatan juga menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi korupsi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik (Hermawan et al., 2023). Di Indonesia, beberapa daerah seperti Kota Cirebon telah berhasil menerapkan sistem administrasi manajemen pemerintahan berbasis digital yang berdampak pada peningkatan efektivitas layanan kepegawaian dan akuntabilitas birokrasi (Hermawan et al., 2023). Keberhasilan daerah lain dalam implementasi SPBE menjadi referensi penting bagi Kota Pangkal Pinang dalam mengoptimalkan strategi transformasi digitalnya.

Namun, di balik potensi besar yang ditawarkan oleh SPBE, tantangan dalam implementasi tidak dapat diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa hambatan utama dalam penerapan SPBE di tingkat daerah meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta resistensi birokrasi terhadap perubahan digital (Adu et al., 2022). Selain itu, literasi digital masyarakat juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi SPBE, mengingat keterbatasan akses dan pemahaman terhadap layanan digital masih menjadi kendala di berbagai daerah (Mardiana et al., 2021). Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil, menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks kebaruan ilmiah, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dalam kajian mengenai implementasi SPBE di tingkat daerah dengan menelaah secara mendalam tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kota Pangkal Pinang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek teknis dan kebijakan umum SPBE, penelitian ini akan mengeksplorasi strategi implementasi SPBE dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pemerintah daerah dalam mengadopsi SPBE secara efektif.

Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerapan SPBE dalam mendukung desentralisasi dan otonomi daerah di Kota Pangkal Pinang serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasinya. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana SPBE telah memberikan dampak terhadap peningkatan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik di Kota Pangkal Pinang serta untuk mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan guna mengatasi hambatan dalam implementasi SPBE. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan digitalisasi pemerintahan di tingkat daerah dan memperkuat posisi Kota Pangkal Pinang sebagai model inovasi dalam penerapan e-government di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan dalam memahami fenomena sosial dan kebijakan publik yang berkembang dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana SPBE diterapkan di tingkat pemerintah daerah serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Penelitian ini memiliki relevansi strategis dalam mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan SPBE serta tantangan yang dihadapi dalam proses digitalisasi pemerintahan di tingkat daerah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung. Wawancara dilakukan dengan pejabat terkait di Diskominfo Kota Pangkal Pinang serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam implementasi SPBE. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif mengenai kesiapan infrastruktur, kendala teknis, serta faktor sosial-budaya yang mempengaruhi efektivitas kebijakan SPBE. Selain itu, analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai regulasi, kebijakan, dan laporan evaluasi SPBE guna memahami dasar hukum serta indikator keberhasilan yang telah diterapkan dalam sistem ini. Observasi langsung dilakukan untuk mengamati bagaimana SPBE diintegrasikan dalam proses administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk dalam sistem perizinan, layanan kependudukan, dan transparansi informasi.

Sebagai bagian dari strategi analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi perbandingan dengan daerah lain di Indonesia yang telah lebih

maju dalam implementasi SPBE, seperti DKI Jakarta dan Surabaya. DKI Jakarta telah berhasil mengembangkan ekosistem digital yang terintegrasi dalam berbagai aspek pelayanan publik, sementara Surabaya menunjukkan keberhasilan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan (Kencono et al., 2024). Studi perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi oleh Kota Pangkal Pinang dalam meningkatkan efektivitas SPBE di era desentralisasi dan otonomi daerah.

Selain studi perbandingan di tingkat nasional, penelitian ini juga merujuk pada praktik implementasi SPBE di negara lain, seperti Estonia dan Korea Selatan. Estonia merupakan salah satu negara dengan tingkat digitalisasi pemerintahan tertinggi di dunia, di mana hampir seluruh layanan publik telah berbasis digital dan terintegrasi dalam sistem e-government yang transparan dan efisien (Ahad & Barsei, 2023). Korea Selatan, di sisi lain, telah menunjukkan keberhasilan dalam membangun infrastruktur digital yang kuat untuk mendukung transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik (Kencono et al., 2024). Pembelajaran dari kedua negara ini memberikan wawasan yang berharga bagi Kota Pangkal Pinang dalam mengembangkan strategi implementasi SPBE yang efektif dan berkelanjutan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengikuti model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Alfayn, 2022). Data yang diperoleh dari wawancara, dokumen kebijakan, dan observasi dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan implementasi SPBE, termasuk efektivitas sistem, kendala teknis, kesiapan sumber daya manusia, serta dampaknya terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, penelitian ini mengkaji sejauh mana SPBE dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan dan sumber daya secara mandiri, namun keberhasilan implementasi SPBE sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen politik dari pemangku kepentingan (Ahad & Barsei, 2023; Simanjuntak et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam implementasi SPBE, seperti masalah digital divide, resistensi terhadap perubahan, dan kebutuhan peningkatan literasi digital di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti (evidence-based policy) dalam mengembangkan infrastruktur digital pemerintahan daerah. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya dalam menghadapi tantangan serupa dalam implementasi SPBE di era desentralisasi dan otonomi daerah.

Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam studi ini tidak hanya bertujuan untuk memahami dinamika implementasi SPBE di Kota Pangkal Pinang tetapi juga untuk memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan kebijakan e-government yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Dengan melakukan studi perbandingan dengan daerah lain di Indonesia serta negara-negara yang telah berhasil dalam digitalisasi pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang lebih inovatif dan adaptif terhadap tantangan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat di Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Pangkal Pinang, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil wawancara mengalami proses reduksi guna menyoroti informasi yang relevan dengan penelitian ini.

Observasi dilakukan secara langsung pada infrastruktur SPBE, termasuk portal layanan digital, sistem perizinan online, dan sistem administrasi internal berbasis elektronik. Data tambahan diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan evaluasi pemerintah, serta studi perbandingan dengan daerah lain di Indonesia dan beberapa negara yang telah sukses dalam implementasi e-government.

Tabel 1.

Hasil Observasi Lapangan

No	Lokasi Observasi	Tanggal Observasi	Temuan Utama
1	Dinas Kominfo Kota Pangkal Pinang	01 Februari 2025	Infrastruktur teknologi cukup memadai, namun masih ada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan SPBE.
2	Sistem Layanan Perizinan Online	05 Februari 2025	Penggunaan layanan meningkat, tetapi masih ada kendala teknis dan literasi digital pengguna.
3	Portal Informasi Publik Kota Pangkal Pinang	10 Februari 2025	Transparansi meningkat, tetapi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital masih rendah.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Pembahasan

Efektivitas SPBE dalam Mendukung Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi memberikan kewenangan lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan dan sumber daya secara mandiri. Dalam konteks ini, SPBE menjadi instrumen strategis yang memungkinkan efisiensi administrasi serta transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kota Pangkal Pinang telah mengadopsi SPBE dalam berbagai aspek, termasuk perizinan, administrasi kependudukan, dan pelayanan publik berbasis digital. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Dibandingkan dengan Surabaya, yang telah berhasil menerapkan sistem digital secara luas dalam pelayanan publik (Mardiana et al., 2021), Kota Pangkal Pinang masih dalam tahap adaptasi. Transformasi digital di Surabaya telah meningkatkan efisiensi pelayanan kependudukan dan pengawasan keuangan daerah. Sebaliknya, beberapa daerah yang gagal menerapkan SPBE secara optimal menghadapi hambatan berupa kurangnya infrastruktur digital dan resistensi birokrasi terhadap perubahan (Adu et al., 2022).

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi SPBE

Meskipun Kota Pangkal Pinang telah menunjukkan kemajuan dalam implementasi SPBE, penelitian ini menemukan beberapa tantangan utama yang masih menghambat efektivitasnya. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem digital menjadi kendala signifikan. Banyak ASN yang belum memiliki kompetensi teknologi informasi yang cukup, menyebabkan ketidakefisienan dalam operasionalisasi sistem digital. Kedua, resistensi terhadap perubahan juga masih terjadi, di mana beberapa birokrat masih enggan beralih dari sistem manual ke sistem digital, seperti yang telah diamati di berbagai daerah lain di Indonesia (Kencono et al., 2024). Ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi, termasuk akses internet yang belum merata, juga menjadi penghambat utama dalam implementasi SPBE yang efektif.

Studi Kasus Internasional: Pembelajaran dari Estonia dan Korea Selatan

Dalam upaya mengoptimalkan implementasi SPBE, Kota Pangkal Pinang dapat mengambil pembelajaran dari negara-negara yang telah sukses dalam menerapkan e-government. Estonia, misalnya, dikenal sebagai negara dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang paling maju di dunia. Hampir seluruh layanan pemerintahan di Estonia telah berbasis digital dan terintegrasi dalam sistem yang transparan dan efisien (Ahad & Barsei, 2023). Sistem identitas digital (e-ID) yang diterapkan Estonia memungkinkan warga mengakses layanan publik secara daring tanpa hambatan administratif yang kompleks. Implementasi sistem ini di Kota Pangkal Pinang dapat meningkatkan efisiensi layanan kependudukan dan administrasi pemerintahan.

Sementara itu, Korea Selatan juga telah menunjukkan keberhasilan dalam transformasi digital dalam pemerintahan. Keberhasilan Korea Selatan dalam membangun infrastruktur digital yang kuat, kebijakan yang jelas, serta investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia telah berkontribusi dalam pengurangan korupsi dan peningkatan efisiensi administrasi publik (Kencono et al., 2024). Kota Pangkal Pinang dapat mengambil pembelajaran dari model Korea Selatan, khususnya dalam hal penguatan kebijakan dan pelatihan bagi ASN untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola sistem digital.

Peran DISKOMINFO dalam Mengoptimalkan Implementasi SPBE

Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam implementasi SPBE di Kota Pangkal Pinang, DISKOMINFO memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas penerapan kebijakan digitalisasi pemerintahan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi bagi ASN guna meningkatkan literasi digital mereka. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi dapat membantu pengembangan sistem digital yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Edukasi publik juga menjadi aspek krusial dalam optimalisasi SPBE. Kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat sering kali menjadi penghambat utama dalam adopsi layanan digital. Oleh karena itu, DISKOMINFO perlu menginisiasi program-program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital pemerintahan.

Prospek Implementasi SPBE di Masa Depan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan untuk mempercepat implementasi SPBE di Kota Pangkal Pinang. Pertama, penguatan infrastruktur digital menjadi prioritas utama, termasuk investasi dalam perluasan jaringan internet dan peningkatan keamanan siber. Kedua, inovasi dalam layanan publik berbasis digital harus terus dikembangkan, seperti pengintegrasian berbagai layanan dalam satu platform yang lebih intuitif dan mudah diakses oleh masyarakat. Ketiga, evaluasi dan monitoring berkelanjutan harus dilakukan untuk menyusun indikator keberhasilan SPBE yang dapat diukur secara berkala, guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan.

Dengan langkah-langkah yang strategis dan pendekatan berbasis bukti, Kota Pangkal Pinang berpotensi menjadi model implementasi SPBE yang sukses dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Transformasi digital dalam pemerintahan bukan hanya sebuah pilihan, tetapi suatu keharusan dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, digitalisasi pemerintahan di Kota Pangkal Pinang dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif.

SIMPULAN

- 1. Efektivitas SPBE dalam Mendukung Desentralisasi dan Otonomi Daerah**
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pangkal Pinang telah memberikan kontribusi terhadap efisiensi administrasi dan peningkatan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan resistensi terhadap perubahan digital.
- 2. Tantangan dalam Implementasi SPBE**
Hambatan utama dalam implementasi SPBE di Kota Pangkal Pinang meliputi kurangnya kompetensi digital di kalangan aparatur sipil negara (ASN), keterbatasan infrastruktur teknologi, serta minimnya literasi digital di masyarakat. Faktor-faktor ini menghambat optimalisasi layanan digital yang telah tersedia.
- 3. Pembelajaran dari Studi Kasus Internasional**
Pengalaman Estonia dan Korea Selatan dalam mengembangkan e-government menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan memerlukan kebijakan yang jelas, investasi dalam infrastruktur digital, serta

penguatan kapasitas sumber daya manusia. Kota Pangkal Pinang dapat mengadopsi strategi serupa guna meningkatkan efektivitas SPBE.

4. Peran DISKOMINFO dalam Pengembangan SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Pangkal Pinang memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan implementasi SPBE, terutama melalui peningkatan pelatihan bagi ASN, kolaborasi dengan sektor swasta, serta edukasi publik guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan digital pemerintahan.

5. Rekomendasi untuk Masa Depan

Untuk mempercepat implementasi SPBE, diperlukan peningkatan infrastruktur digital, inovasi dalam layanan publik berbasis digital, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dengan pendekatan yang tepat, Kota Pangkal Pinang memiliki potensi untuk menjadi model keberhasilan dalam digitalisasi pemerintahan daerah.

Referensi :

- Adu, a., Hartanto, R., & Fauziati, S. (2022). Hambatan-hambatan dalam implemetasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) pada pemerintah daerah. *Jiko (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 5(3), 215-223. <https://doi.org/10.33387/jiko.v5i3.5344>
- Ahad, M. and Barsei, A. (2023). Sistem pemerintahan berbasis elektronik: best practice dari pemerintah daerah di indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 52-74. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236>
- Alfayn, M. (2022). From e-government to good governance: examining the impact of digitalization on public service delivery in indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 4(2), 19-40. <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i2.14873>
- Alfayn, M. (2022). From e-government to good governance: examining the impact of digitalization on public service delivery in indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 4(2), 19-40. <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i2.14873>
- Astuti, N., Sukarsa, I., & Raharja, I. (2021). Analisis aspek penerapan spbe pada salah satu kabupaten di indonesia. *Jitter Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Komputer*, 2(3), 571. <https://doi.org/10.24843/jtrti.2021.v02.i03.p16>
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T., Ridlo, A., & Rohmah, E. (2023). Peran sistem pemerintah berbasis elektronik (spbe) dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik di indonesia. *Sosio.Yustisia*, 3(1), 71-95. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401>
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T., Ridlo, A., & Rohmah, E. (2023). Peran sistem pemerintah berbasis elektronik (spbe) dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik di indonesia. *Sosio.Yustisia*, 3(1), 71-95. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401>
- Fachrizar, M., Wibawa, J., Fauzan, R., & Radliya, N. (2023). Aplikasi pendukung pelayanan publik berbasis mobile dalam mendukung penerapan e-government pada mal pelayanan publik kota cimahi. *Majalah Ilmiah Unikom*, 21(1), 21-28. <https://doi.org/10.34010/miu.v21i1.10686>
- Hermawan, K., Pusparani, I., & Solihudin, D. (2023). Transformasi digital layanan kepegawaian pemerintah daerah kota cirebon: studi kasus kebijakan sistem administrasi manajemen pemerintahan (sampean). *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 13-26. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.13-26>
- Idrus, I. and Zakiyah, U. (2022). Inovasi sistem manajemen administrasi kependudukan warga

- berbasis informasi elektronik pada aplikasi pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil DKI Jakarta. *Journal of Political Issues*, 3(2), 77-85. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.69>
- Kencono, B., Putri, H., & Handoko, T. (2024). Transformasi pemerintahan digital: tantangan dalam perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) di Indonesia. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498-1506. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519>
- Kencono, B., Putri, H., & Handoko, T. (2024). Transformasi pemerintahan digital: tantangan dalam perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) di Indonesia. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498-1506. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519>
- Mardiana, M., Adinda, R., & Isnaini, N. (2021). Analisis faktor keberhasilan implementasi e-government di Bandung, Batam dan Surabaya. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(7), 598-609. <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i7.150>
- Rachmawati, R., Anjani, D., Ainur, A., Nurwidiani, T., & Almasari, H. (2022). Electronically-based governance system for public services: implementation in the special region of Yogyakarta, Indonesia. *Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography*, 16(1). <https://doi.org/10.5719/hgeo.2022.161.5>
- Simanjuntak, W., Subagyo, A., & Sufianto, D. (2024). Peran pemerintah dalam implementasi artificial intelligence (ai) di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1-15. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.332>
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024). Desentralisasi dan upaya peningkatan otonomi daerah: menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Suwarlan, E., Suparman, A., & Taufik, O. (2023). Pembangunan kapasitas dinas komunikasi dan informatika dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. *Jurnal Agregasi Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(1), 98-116. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i1.7255>